

ANALISIS KRITIS AKSIOLOGI PENDIDIKAN NASIONAL ANTARA FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM VS NILAI-NILAI PANCASILA

Ali Hasan Siswanto¹**Mukaffan²**^{1,2}UIN Kiai Achmad Siddiq Jember¹alhasansiswanto81@gmail.com & ²mukaffan.20@gmail.com

DOI :		
Received: Mei 2023	Accepted: Juni 2023	Published: Juni 2023

Abstract

Careful thought of ontological, epistemological, and axiological establishments is required while fostering a public school system. As an establishment for dissecting the utilization of instructive speculations connected with the schooling objective, exceptionally comparable to Pancasila's qualities, the axiological underpinning of a public schooling system is vital. In line with the Pancasila principles, national education promotes a rational mind and noble character: divinity, humanity, unity, democracy, and justice. Regarding the Pancasila principles, which maintain the principles of kindness, truth, beauty, and divinity, the national education objectives aim to assist students in developing a rational mind and noble character. They likewise maintain that understudies should have the option to work productively and imaginatively to be answerable for assisting Indonesia with adjusting to the requests of a majority rule and just society.

Keyword: *national education goals, values of Pancasila, axiological foundation*

Abstrak

Pemikiran yang hati-hati tentang pembentukan ontologis, epistemologis, dan aksiologis diperlukan saat membina sistem sekolah umum. Sebagai landasan untuk membedah pemanfaatan spekulasi-spekulasi instruktif yang terkait dengan tujuan persekolahan, terutama yang sebanding dengan sifat-sifat Pancasila, landasan aksiologis sistem persekolahan umum menjadi sangat penting. Fungsi pendidikan nasional adalah menumbuhkan pemikiran rasionalitas dan akhlak mulia dalam kaitannya dengan nilai-nilai pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tujuan pendidikan terkait dengan nilai-nilai pancasila ini, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan ketuhanan. Nasional bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan akal budi yang rasional dan akhlak mulia. Mereka juga berpendapat bahwa siswa harus dapat bekerja secara produktif dan imajinatif untuk bertanggung jawab membantu Indonesia menyesuaikan diri dengan kebutuhan mayoritas

dan komunitas yang adil

Kata Kunci: Tujuan Pendidikan nasional, nilai-nilai Pancasila, landasan aksiologis

Pendahuluan

Pendidikan dalam pandangan luas adalah cara yang paling umum untuk membingkai karakter dalam keseluruhan perspektifnya, yaitu perkembangan sudut fisik, otak dan hati. Alasan bersekolah adalah tindakan memberikan informasi agar kebudayaan dapat diberikan dari satu zaman ke zaman lain. Kemajuan pemikiran logis yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya adaptasi dalam proses pendidikan, khususnya di sekolah. Namun, teori-teori iptek yang akan dikomunikasikan harus memperhatikan perkembangan dan harkat dan derajat manusia. Persoalan unggul yang dilihat dalam siklus pembelajaran adalah pemilihan nilai-nilai yang harus diciptakan dalam diri siswa¹.

Sementara rasionalitas niscaya akan menjadi ciri struktur pendidikan nasional Indonesia di masa depan, budaya Indonesia akan tetap menjadi landasan nilai-nilai kehidupan. Sisi baik kehidupan bernegara dan bernegara harus menjadi pemikiran mendasar dalam merencanakan sistem persekolahan umum. Di Indonesia, moral dan nilai-nilai Pancasila dapat melayani dua tujuan: mereka dapat membantu mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh ikatan dan loyalitas leluhur dan efek negatif dari modernisasi. Menurut Kartodirdjo, tujuan sistem pendidikan Indonesia adalah untuk menjunjung eksistensi bangsa sekaligus meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan tatanan sosial modern².

Selain itu, kurikulum sekolah menengah harus mengajarkan kewarganegaraan dan agama, ilmu alam, bahasa, ilmu menurut Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan sosial, matematika, pendidikan jasmani dan olahraga, seni dan budaya, muatan lokal, dan keterampilan/kejuruan Pendidikan Agama, Kewarganegaraan, dan Bahasa harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan tinggi. Pendidikan pancasila tidak diwajibkan dalam kurikulum sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, sehingga terkesan mengabaikan prinsip-prinsip kehidupan nasional dan internasional³.

Penting untuk mengkaji Peraturan Sistem Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Persekolahan Umum. Sejumlah faktor, termasuk landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya harus diperhatikan dalam membangun sistem pendidikan nasional. Bidang pendidikan menjadi fokus dari subbidang Filsafat Pendidikan. Teori Pelatihan sesuai nalar filosofis dasar dan atas ke bawah akan mengkaji persekolahan sampai ke substansinya. Penalaran Sekolah akan secara eksplisit memeriksa dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis instruksi. Hakikat pendidikan dalam kaitannya dengan eksistensi manusia

¹ Siti Nurhalisa and others, 'The Urgence Of Islamic Philosophy For Education In Elementary School', *JASNA : Journal For Aswaja Studies*, 2.2 (2022), 31–40 <<https://doi.org/10.34001/jasna.v2i2.3707>>.

² Kolo Adriana, 'PEMBINAAN NASIONALISME MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE', *Nasionalismen Dan KeBangsaan*, 8.2 (2019).

³ Abidah Dwi Rahmi Satiti and Falikhatun Falikhatun, 'Accounting Curriculum Evaluation in Implementation Merdeka Belajar - Kampus Merdeka', *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 11.1 (2022), 21 <<https://doi.org/10.25273/jap.v11i1.9880>>.

akan dikaji dengan landasan ontologis pendidikan⁴. Hakikat kebenaran dalam hubungannya dengan kebenaran teori pendidikan akan ditelaah oleh landasan epistemologis pendidikan. Penerapan teori pendidikan pada Menurut Suharto, landasan aksiologis pendidikan akan digunakan untuk menilai tujuan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan norma dan nilai moral.

Basis aksiologis dalam pendidikan akan memungkinkan guru untuk mempertimbangkan dengan jelas hubungan antara pendidikan dan tujuan hidup, memungkinkan mereka untuk memandu penciptaan program pendidikan yang menghubungkan realitas dengan konteks global. Menggali landasan aksiologis pendidikan sangat membantu dalam membangun landasan epistemologis pendidikan yang konsisten. Landasan epistemologis sekolah akan membantu para guru dengan lebih baik menilai usulan-usulan spekulasi yang merupakan jawaban atas persoalan-persoalan pokok pengajaran.⁵

Empat fungsi filsafat pendidikan adalah teoretis, spekulatifanalitik, instruksional. Fungsi spekulatif menekankan bahwa filsafat pendidikan mengejar pemahaman, merumuskan, dan menemukan hubungan antara berbagai masalah pendidikan. Sementara Brameld mengklasifikasikan berbagai sudut pandang untuk memenuhi fungsi filsafat pendidikan.⁶

Sebagai permulaan, progresivisme Ide pendidikan progresif yang fundamental menjadi dasar bagi teori progresivisme. Selain memberikan pengetahuan, pendidikan juga tentang menumbuhkan kapasitas berpikir rasional. Penerapan metode ilmiah, seperti menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih dari berbagai pilihan, adalah pemikiran. Menurut Brameld tujuan pendidikan adalah "rekonstruksi pengalaman secara terus-menerus", atau menyesuaikan dan menyesuaikan kembali sebagai tanggapan terhadap tuntutan lingkungan.

Ketiga, permanen. Gagasan bahwa pendidikan harus mengembalikan semangat pencerahan yang menguasai Abad Pertengahan adalah dasar dari teori perenialisme. Manusia telah menyadari keberadaan tatanan hidup yang ditentukan secara logis untuk mengidentifikasi bukti diri melalui semangat rasional pencerahan abad pertengahan.

Rekonstruksionisme adalah yang keempat. Premis teori rekonstruksionis adalah bahwa siswa dapat meningkatkan kapasitasnya untuk secara konstruktif menanggapi tuntutan perkembangan dan perubahan masyarakat kontemporer melalui pengaruh teknologi dan sains. Perubahan semacam ini dapat membuat siswa bebas dan aman.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptik dengan pendekatan studi kepustakaan (library research).⁷ Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan

⁴ Ulandari Safitri, Adek Nuarizal, and Nurhizrah Gistituati, 'Urgensi Analisis Kebijakan', *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6.1 (2021), 72 <<https://doi.org/10.29210/3003818000>>.

⁵ Yoga Putra Semadi, 'Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter', *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2.2 (2019), 82 <<https://doi.org/10.23887/jfi.v2i2.21286>>.

⁶ Ahmad Zarkasyi, 'Pendidikan Diniyah Kajian Filsafat Pendidikan Islam', *Qolamuna (Jurnal Studi Islam)*, 6.1, 135–52.

⁷ J. Michael Spector and others, 'Handbook of Research on Educational Communications and Technology', in *Handbook of Research on Educational Communications and Technology: Fourth Edition*, 2014, pp. 1–1005 <<https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3185-5>>.

informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian⁸.

Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.⁹

Hasil dan Pembahasan

Hirarki Nilai-Nilai dalam Filsafat Pendidikan Islam

Nilai-nilai luhur kehidupan manusia adalah kebenaran, keindahan, kebaikan, dan agama. Sisi positif keberadaan manusia yang terhormat diperiksa oleh bagian penalaran yang disebut aksiologi. Dalam aksiologi, nilai-nilai fundamental dan filosofis menjadi pokok bahasan teoretis, atau pembahasan nilai-nilai pada intinya. Aksiologi juga dikenal sebagai filsafat nilai karena secara filosofis membahas nilai. Menurut Katzoff, Subbidang filsafat yang berfokus pada nilai adalah aksiologi, seperti agama, keindahan, kebenaran, dan kebaikan.¹⁰

Gagasan tentang nilai yang signifikan adalah sifat bawaan dan menggambarkan semua yang ada di alam semesta dan terkait dengan keberadaan manusia. Nilai-nilai ini bukan hanya pendapat pribadi yang terbatas pada dunia manusia adalah komponen dari keadaan metafisik alam semesta secara keseluruhan. Secara filosofis, hubungan antara manusia sebagai objek dan kapasitas kognitifnya untuk memahami karakteristik lingkungannya merupakan inti dari konsep nilai. Apresiasi terhadap kehidupan manusia merupakan dasar dari kemampuan manusia untuk menangkap nilai. Cara yang mencakup seluruh alam semesta bersama manusia menyebabkan apa yang terjadi sangat berharga. Tidak mungkin untuk mengatakan pernyataan tentang nilai kesadaran manusia hanya berasal dari dalam diri manusia; namun, kesadaran manusia memiliki nilai di alam semesta.

Pada kenyataannya, nilainya meningkat atau menurun. Menurut Deeken, ada empat tingkat hierarki nilai. Pertama, manfaat kesenangan. Tingkat nilai ini termasuk kualitas material yang benar-benar memuaskan dan membuat orang bahagia. Contoh: memiliki banyak uang atau merasa senang setelah makan. Kedua, sisi positif dari kehidupan. Nilai-nilai yang sangat menentukan kehidupan sosial dan pribadi seseorang termasuk dalam tataran nilai kehidupan. Misalnya: kesejahteraan individu, keterampilan, dan keadilan sosial. Ketiga, prinsip moral. Ragam nilai kejiwaan yang sama sekali tidak berhubungan dengan kondisi fisik seseorang membentuk tingkatan nilai spiritual. Kualitas mental ini menggabungkan kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Keempat, prinsip moral. Modalitas yang bernilai sakral

⁸ Suharsimi Arikunto, 'Metode Penelitian Metode Penelitian', *Metode Penelitian Kualitatif*, 5.17 (2017), 43.

⁹ Ulrika Östlund and others, 'Combining Qualitative and Quantitative Research within Mixed Method Research Designs: A Methodological Review', *International Journal of Nursing Studies*, 48.3 (2011), 369–83 <<https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.10.005>>.

¹⁰ Marjuni, 'Filsafat Pendidikan Pancasila Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Aqidah-Ta*, VII.1 (2021), 82.

termasuk dalam tataran nilai spiritual. Nilai-nilai pribadi, khususnya dalam hubungannya dengan Tuhan, makhluk yang paling tinggi dan paling suci, membentuk nilai spiritual ini.¹¹

Nilai kebaikan manusia ditelaah dalam akhlak, sehingga nilai sering disebut sebagai nilai moral. Kualitas moral adalah sumber nilai penting untuk menilai positif atau negatif orang sebagai manusia, tidak sebanding dengan pekerjaan tertentu, misalnya sebagai peneliti, pengrajin, atau makelar. Ada dua cara untuk membedakan etika yang secara khusus berbicara tentang bagaimana kebaikan manusia berkembang:

Pertama-tama, moral dipahami dalam arti yang sama dengan kualitas yang mendalam. Moral seseorang dan masyarakat terjalin dengan kebiasaan dan praktik yang baik. Cara hidup sehat ini diikuti, dan turun temurun dari generasi ke generasi. Kemudian, perilaku sehat tersebut dibakukan menjadi aturan atau norma yang diajarkan secara lisan dan dipahami oleh orang-orang di masyarakat. Norma atau aturan terutama berfokus pada kualitas perilaku manusia.¹²

Kedua, ada perbedaan antara konsep etika dan moralitas. Etika didefinisikan sebagai analisis mendalam tentang bagaimana manusia seharusnya berperilaku dan hidup dalam keadaan tertentu, etika adalah bidang studi tentang moral. yang berbicara tentang apa yang baik dan salah secara moral dan cara bertindak dalam situasi tertentu. Orang berefleksi secara kritis sebelum membuat keputusan, mengembangkan sikap, dan bertindak secara moral. Ada tiga komponen pemikiran kritis ini: 1) Renungan mendalam tentang standar moral yang ditetapkan oleh etika dan moralitas dalam definisi mereka yang awal, khususnya standar yang telah dijunjung tinggi selama ini. 2) Refleksi dasar atas keadaan luar biasa yang dihadapi dengan segala kerumitannya dan keunikan yang ada di dalamnya. (3) Pertimbangan secara kritis berbagai perspektif individu atau kelompok terhadap segala sesuatu di dunia ini. Memahami manusia, Tuhan, alam, masyarakat, sistem politik sosial, dan sistem ekonomi.¹³

Dari segi nilai kebaikan, Moralitas (karakter) seseorang atau kelompok dapat dianggap baik atau buruk. Standar moral adalah aturan untuk kehidupan yang terhormat sesuai kualitas yang hebat. Standar moral berasal dari kecenderungan hidup yang besar dan metode Hidup yang baik. Standar moral digunakan sebagai ukuran untuk mentalitas dan aktivitas manusia yang benar mengenai positif atau negatif sebagai manusia, bukan sebagai penghibur pekerjaan terbatas dan khusus.

Nilai kebajikan sebagai dasar prinsip moral memiliki kualitas yang menyertainya. Pertama-tama, langsung dan objektif karena kualitas etis pada manusia harus dibebaskan dari karakteristik egois yang terlacak dalam kehendak yang relatif. Kedua, esensial, karena kualitas etis pada manusia mencakup janji untuk bertindak dan merupakan penopang dari kerinduan utama. Ketiga, genuine atau asli dengan alasan kualitas etis adalah kenyataan, bukan sekedar hidup di negeri khayalan atau tipu muslihat belaka. Keempat, universal dan

¹¹ L Herlina, 'STRATEGI PENDIDIKAN NILAI ISLAMI DI PERGURUAN TINGGI UMUM (STUDI KASUS DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM)', *PALAPA : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 7.3 (2019), 131–48.

¹² Pristiwiyanto, 'PANCASILA DALAM KAJIAN FILSAFAT: ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI', *Fatawa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2.1 (2021), 253–62.

¹³ Muizudin, 'Implementasi Konsep Aliran Filsafat Pendidikan John Dewey Dalam Pendidikan Nilai-Nilai Islam', *JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, 06.2 (2022), 184–99.

luas, karena moralitas selalu membutuhkan ruang yang luas. Kelima, itu positif, bukan negatif, karena standar moral dapat berfungsi sebagai rekomendasi atau penolakan. 6. Peringkat tinggi, karena nilai kebaikan memiliki sifat-sifat yang alami, yang merupakan dasar nilai standar moral.¹⁴

Aksiologi Pendidikan Nasional

Para ahli kebudayaan mendefinisikan nilai adalah komponen penting dari budaya. nilai-nilai psikologis seperti "baik", "buruk", "benar", "salah", "indah", dan "berdosa" harus menjadi landasan bagi setiap pembahasan tentang kebudayaan. Penghargaan karena gagasan ukuran yang diterima oleh individu atau kelompok sangat penting bagi budaya. Penghakiman hadir dalam gagasan tentang ukuran. Item nilai potensial yang perlu dievaluasi juga merupakan gagasan tentang ukuran nilai. Ini memiliki hasil bahwa penilaian seseorang pada dasarnya adalah penilaian yang tidak kekal. Seseorang dapat memilih sekali berdasarkan apa hasil penilaian pada gagasan mendasar tentang ukuran, tetapi hasil tersebut akan berubah seiring dengan perubahan atau perkembangan gagasan tentang ukuran.¹⁵

Konsekuensi penilaian seseorang pasti bisa berubah, namun bukan berarti seseorang tidak memiliki pendirian. Sangat berisiko jika seseorang benar-benar mengikuti ide estimasi lama yang dia percayai, sementara ide estimasi baru yang lebih baik telah muncul. Seseorang yang ingin terbuka dan mau terus berdialog dengan masyarakat dalam arti luas, dengan budaya baru, kepercayaan yang dianut, dan hasil penilaian hadir—harus menyadari fakta ini. Menurut Brameld, berdialog dengan masyarakat akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai objek dan konsep ukuran.

Menurut Benoit, faktor-faktor berikut mempengaruhi pemilihan nilai-nilai budaya: Pertama, nilai-nilai budaya merupakan hasil dari pergerakan sejarah tertentu dari perspektif sejarah. Dari perspektif filosofis, nilai-nilai budaya bersifat mutlak, mendasar, dan universal, tetapi diajarkan (diajarkan, disajikan, dan ditonjolkan) dan dipelajari. Deklarasi dan penjelasan nilai-nilai ini adalah produk dari gerakan sejarah, gerakan sosial, atau kerja manusia.¹⁶

Kedua, perspektif sosiologis mengungkapkan bahwa berbagai kelompok nilai budaya dimanfaatkan dengan cara yang berbeda. Ada nilai-nilai yang mengekspresikan permintaan secara umum teoretis. Nilai-nilai seperti keadilan, cinta, dan kejujuran adalah contoh kebutuhan (hak, kewajiban) yang dianggap universal. Nilai juga dapat menunjukkan hal-hal umum tetapi tidak penting, seperti bersaing dan tekun, kebaikan, dll. Kualitas umum dan teoretis, yang tidak menunjukkan situasi spesifik, kadang-kadang dianggap tidak relevan dengan lingkungan sosial. Cara masyarakat memilih nilai-nilainya, serta bagaimana nilai-nilai itu dirumuskan, dipahami, dan dipelajari dalam praktik, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip

¹⁴ Nuthpaturahman, 'PERBANDINGAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM DAN FILSAFAT PENDIDIKAN BARAT', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.2 (2022), 1392–1408.

¹⁵ Abdul Karim Koirul Huda, 'MENJADIKAN PANCASILA DAN UUD SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PENGEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA', *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4.1 (2021).

¹⁶ Persoalan Kebangsaan, 'Filsafat Ilmu Dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan', *Jurnal Filsafat*, 21.2 (2016), 99–117 <<https://doi.org/10.22146/jf.3111>>.

ini relevan dalam konteks sosial tertentu dan tidak hanya abstrak tetapi juga universal.¹⁷

Perkara perwujudan kebudayaan didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang merupakan jiwa kebudayaan. Permintaan untuk hidup adalah kesan substansial dari kualitas sosial konseptual. Panca indera dapat menangkap aktivitas manusia, namun hanya akal manusia yang dapat menangkap nilai-nilai budaya. Kualitas sosial dan gaya hidup manusia didukung oleh tanda-tanda sosial sebagai sarana sosial. Menurut Suriasumantri, sarana kebudayaan pada hakekatnya adalah perwujudan fisik dari kebudayaan, baik produk kebudayaan maupun alat yang mempermudah kehidupan.

Nilai-nilai diurutkan berdasarkan kepentingan menurut skala hierarkis yang ada di setiap budaya. Pendidikan sebagai upaya sadar untuk membantu siswa dalam membina jiwa, karakter dan kemampuan yang sebenarnya, berkewajiban untuk memperhatikan kualitas sosial secara konsisten. Pengembangan nilai-nilai budaya yang tertanam dalam diri siswa harus diperhitungkan dalam pendidikan agar tetap relevan hingga saat ini.¹⁸

Kualitas sosial sebagai kerangka adalah perkembangan ide-ide unik yang hidup dalam kepribadian penghuni, khususnya sehubungan dengan sistem nilai budaya yang mengatur apa yang dianggap penting dan penting dalam kehidupan mereka adalah komponen budaya yang berfungsi sebagai pedoman dan penggerak perilaku manusia. Kualitas sosial sebagai kerangka hanyalah gagasan konseptual tanpa rencana yang tegas, sehingga membutuhkan aturan yang asli sebagai standar, peraturan, dan aturan yang tegas dan substansial. Menurut Koentjaraningrat, sistem nilai budaya harus tetap menjadi landasan bagi peraturan-peraturan ini, demikian pula kekhususan konsep abstrak sistem nilai itu.

Prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan aksiologis Sistem kehidupan nasional meliputi sistem pendidikan nasional, yang berarti termasuk dalam kehidupan nasional dan global. Karena merupakan komponen dari suatu sistem yang berlingkup nasional maupun global, maka sistem pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang lepas dari budaya atau nilai-nilai. Sistem pendidikan harus selalu dapat beradaptasi dengan perubahan konteks dan responsif terhadap tuntutan relevansi rentang hidup. Menurut Tilaar, hal terpenting yang harus dimiliki sistem pendidikan nasional adalah seperangkat konsep dasar dan nilai-nilai budaya yang jelas yang berfungsi sebagai dasar bagi semua tingkat pendidikan. Karena itu, sistem tidak perlu menyertakan peraturan pelaksanaan yang ekstensif.¹⁹

Karena kualitas nilai sosial Indonesia adalah sisi positif dari Pancasila, maka Pancasila adalah landasan aksiologis dari sistem persekolahan umum di Indonesia. Landasan ontologis Pancasila dan landasan aksiologis sistem pendidikan nasional Indonesia sejalan dengan nilai-nilainya. Premis ontologis sistem sekolah negeri Indonesia adalah cara pandang negara Indonesia terhadap gagasan kehidupan manusia. Identitas pribadi bangsa Indonesia dibentuk oleh nilai-nilai-nilai dasar kemanusiaan serta nilai-nilai permanen yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Publik Indonesia dan publik Indonesia disetarakan dengan negara

¹⁷ Hindun Smith, 'Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.4 (2023), 184–90.

¹⁸ Mappasiara, 'Filsafat Pendidikan Islam', *Inspiratif Pendidikan*, 6.2 (2017), 269 <<https://doi.org/10.24252/ip.v6i2.5231>>.

¹⁹ Sunarni Yassa, 'Pendidikan Pancasila Ditinjau Dari Perspektif Filsafat (Aksiologi)', *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.12928/citizenship.v1i1.10442>>.

dan penduduk yang berbeda dengan kualitas manusia yang nyata. Notonagoro menegaskan, Anda dapat menemukan nilai-nilai seperti keadilan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan di negara lain; namun rumusan persatuan bangsa Indonesia yang utuh menjadi ciri khas karena hanya Pancasila yang dimiliki.

Sisi mulia eksistensi Sila kedua Pancasila terdiri dari pemahaman naluri manusia dengan tujuan agar premis aksiologis sistem persekolahan umum Indonesia adalah pelaksanaan premis ontologisnya. Penopang ontologis sistem sekolah umum di Indonesia merupakan hakikat kehidupan manusia, khususnya sebagai pluralis tunggal atau monopluralis. Komponen tubuh dan jiwa (pikiran, indera, dan kehendak) digabungkan dalam bentuk aslinya; Sifat regulernya adalah gagasan tentang makhluk individu dan makhluk sosial dalam solidaritas soliter, serta situasi normalnya sebagai individu bebas dan hewan Tuhan dalam solidaritas soliter.²⁰

Tidak hanya kebenaran, keindahan, dan kebaikan manusia Indonesia yang membentuk nilai-nilai kemanusiaannya, tetapi juga memiliki sifat adil dan beradab. Kemanusiaan yang beradab tidak membedakan antara perasaan dan kehendak dari akal, melainkan menyatukan keduanya untuk bekerja sama. Pikiran atau keyakinan adalah kerjasama antara kehendak, perasaan, dan akal. Budi dapat memahami dan memahami sifat-sifat ketat sebagai gambaran dunia nyata. Nilai-nilai agama yang mutlak dan tidak berubah tentang keabadian dan kesempurnaan adalah dua contohnya. Menurut Notonagoro, “kemanusiaan yang adil” mencakup hubungan keadilan yang utuh, yang mencakup adil pada diri sendiri, komunitas, bangsa, dan Tuhan sebagai pusat kemanusiaan.²¹

Indonesia tidak memiliki lembaga agama. Sebaliknya, negara itu memiliki tatanan hukum yang mengakui hukum alam, Tuhan, dan moralitas (etis). Peraturan tidak ditetapkan secara tertulis ini merupakan mata air materi dan mata air nilai yang sangat berharga untuk negara serta regulasi positif Indonesia. Menurut Notonagoro, nilai-nilai agama yang diturunkan Tuhan serta nilai-nilai kemanusiaan harus dihormati dan diperhatikan ketika penguasa membuat undang-undang, peraturan, dan keputusan.

Analisis Kritis Sistem Pendidikan Nasional Antara Filsafat Pendidikan Islam dan Nilai-Nilai Pancasila

Premis biologis sistem sekolah umum sangat berharga untuk memeriksa penggunaan spekulasi instruktif yang berhubungan dengan tujuan instruktif. Nilai-nilai luhur kehidupan menjadi fokus utama tujuan pendidikan nasional. Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan aksiologis sistem sekolah nasional di Indonesia. Bab I Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menggambarkan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagai sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dibuat berdasarkan ketentuan ini sama pentingnya dengan dibuatnya komponen pendidikan lainnya, terutama

²⁰ Dilla Fadhilah, ‘Manusia Dan Pendidikan Dalam Sudut Pandang Filsafat Pendidikan Islam: Literature Review’, *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 18.2 (2022), 46–57 <<https://doi.org/10.31000/rf.v18i2.6822>>.

²¹ Fithriani, ‘Implikasi Aksiologi Dalam Filsafat Pendidikan’, *Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 4.2 (2019), 83–92.

untuk lebih mengevaluasi proposal teori untuk mengatasi masalah pendidikan utama.²²

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” bunyi Pasal 3 Bab II. Potensi siswa untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Mereka juga harus menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab atas perbuatannya, merupakan tujuan dari proses ini. Definisi tujuan pelatihan publik dalam satu kalimat tidak mengandung ide yang masuk akal. Bahasanya terlalu spesifik dan tidak mengungkapkan nilai-nilai Pancasila dengan jelas.²³

Pandangan nasional Indonesia tentang hakikat manusia dari sudut pandang aksiologis dan ontologis, khususnya nilai-nilai Pancasila, perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan pendidikan nasional. Wajar saja, rasionalitas—sekalipun rasionalitas yang beradab—tetap menjadi fokus pendidikan nasional. Kemampuan berpikir logis dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama, kebaikan, keindahan, dan kebenaran disebut “berpikir rasional yang beradab”. Untuk membuat definisi tujuan pelatihan publik masuk akal, penting untuk fokus pada berbagai spekulasi instruktif yang ada dengan tujuan agar rencana ekstensif dapat diselesaikan. Esensialisme merupakan salah satu teori pendidikan yang menjadi pertimbangan dalam mengembangkan tujuan pendidikan; namun, perenialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme tidak berangkat dari ranah tujuan.²⁴

Motivasi di balik pengajaran dalam pandangan hipotesis esensialisme adalah asimilasi kualitas sosial ke dalam semangat siswa. Siswa harus mampu melakukan sesuatu dengan berpikir kreatif agar dapat terus menerus menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, yang merupakan tujuan pendidikan yang berlandaskan progresivisme. Pengembangan jiwa rasional merupakan tujuan pendidikan berdasarkan teori perenialisme agar peserta didik dapat menemukan buktinya sendiri. Pengembangan kemampuan beradaptasi secara konstruktif terhadap tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat modern merupakan tujuan pendidikan berdasarkan teori rekonstruksionisme.

Pencantuman komponen utama di bawah ini berpotensi untuk menyempurnakan rumusan tugas dan tujuan sekolah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Bab II Sesuai dengan silambung Pancasila, khususnya Tujuan pendidikan nasional adalah ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan, rakyat, dan keadilan menumbuhkan pemikiran rasional dan akhlak mulia. Tujuan pembinaan umumnya membina kemampuan siswa untuk menjadi orang yang bisa berpikir secara wajar dan berakhlak mulia, khususnya memelihara prinsip-prinsip agama, kebaikan, kebenaran, dan kemanfaatan, serta menjadi warga negara yang inovatif dan bertanggung jawab dalam membangun Indonesia untuk memenuhi

²² Masyarakat dan Lingkungan Fithriani, 'Pandangan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Manusia', 'Pandangan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Manusia, Masyarakat Dan Lingkungan', *Jurnal Intelektualita*, 4.1 (2016), 47–65 <http://narqwelovers.blogspot.co.id/2015/12/pandangan-filsafat-pendidikan-islam_15.html>.

²³ Hikmatul Mustaghfiroh, 'Rekonstruksi Filsafat Pendidikan Islam (Mengembalikan Tujuan Pendidikan Islam Berbasis Tujuan Penciptaan Dan Tujuan Risalah)', *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10.1 (2015), 89–104 <<https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.786>>.

²⁴ Ifmawati Ifmawati, 'Nilai-Nilai Filosofis Dalam Pendidikan Agama Islam', *Journal of Islamic Education and Innovation*, 1.2 (2020), 9 <<https://doi.org/10.26555/jiei.v1i2.3384>>.

kebutuhan akan pemahaman budaya modern dan adil.²⁵

Kurikulum sekolah dasar dan menengah harus mencakup elemen wajib seperti pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu alam dan sosial, seni dan budaya, olahraga, keterampilan dan keterampilan, dan muatan lokal, menurut Bab X Pasal 37 Pendidikan agama, kewarganegaraan, dan pengajaran bahasa harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 1, kurikulum untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi telah diterapkan. 22 Tahun 2006. Mata pelajaran dan mata kuliah Diklat Pancasila diharapkan tidak digabung dengan PPK dalam struktur program pendidikan dasar, pilihan dan perguruan tinggi.²⁶

Menurut Kurikulum sekolah dasar, menengah, dan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2006 perlu disempurnakan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Susunan program pendidikan untuk sekolah dasar dan tambahan serta tentang yayasan tersier dikaitkan dari 29 November hingga 23 Desember 2012. Konfigurasi rencana pendidikan baru akan dilaksanakan pada tahun 2013 dimulai dengan Semua sekolah memiliki kelas I, IV, VII, dan X. Pada Maret 2013, tenaga kependidikan dan guru akan mendapatkan pelatihan. Pada tahun 2014, semua sekolah menerapkan rencana pelajaran yang diperbarui untuk kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI. Tahun 2015 merupakan implementasi keseluruhan untuk kelas I sampai dengan XII. Evaluasi formatif dari desain kurikulum baru akan dilakukan pada bulan Juni 2013 serta evaluasi sumatif pada tahun 2016.

Jumlah mata pelajaran dalam kurikulum SD yang direvisi pada tahun 2013 akan dikurangi dari 10 menjadi 6. Mata pelajaran IPA disusun menjadi materi diskusi bahasa Indonesia dan ilustrasi matematika. Mata pelajaran Sosiologi dikoordinir menjadi materi percakapan topikal contoh Pelatihan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Bahasa Indonesia dalam pendidikan seni, budaya, kerajinan, olahraga, kesehatan, dan muatan lokal, topik dibahas. Mata pelajaran Self-Improvement dimasukkan ke dalam semua topik pendidikan: Pancasila dan Kewarganegaraan, Agama, Matematika, dan Bahasa Indonesia, masuk dalam struktur kurikulum baru kelompok A tahun 2013.

Struktur program pendidikan tahun 2013 yang baru untuk Sekolah Pelatihan Opsional akan mengambil jurusan di sekolah menengah atas dengan mata pelajaran peminatan akademik akan menggantikan mata pelajaran utama. Ada tiga kelompok dalam struktur kurikulum baru Sekolah Pendidikan Menengah. Bunch An menggabungkan mata pelajaran Ketat, Bahasa Indonesia, Pendidikan Sejarah Indonesia, Pancasila dan Kewarganegaraan, Matematika, dan Bahasa Inggris. Kelompok B terdiri dari mata pelajaran seni budaya, kerajinan tangan, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, serta mata pelajaran peminatan akademik dan kejuruan masing-masing masuk dalam kelompok C untuk SMK dan

²⁵ Ilham Akbar, Mahmud Arif, and Januariansyah Arfaizar, 'Aksiologi Pendidikan Islam', *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 6.1 (2021), 13–22 <<http://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/107>>.

²⁶ Reffy Ananda Rizki and Lulu Fahkrunisa, 'Evaluation of Implementation of Independent Curriculum', *Journal of Curriculum and Pedagogic Studies (JCPS)*, 1.4 (2022), 32–41 <<https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jcps>>.

SMA.²⁷

Kelompok A dan B memiliki mata pelajaran yang diwajibkan dalam kurikulum SMA, sedangkan kelompok C memiliki mata pelajaran peminatan akademik dan mata pelajaran pilihan. Selain itu, mata pelajaran peminatan skolastik kelompok C dibagi menjadi tiga peminatan. Pertama, matematika, biologi, fisika, dan kimia termasuk dalam Peminatan Matematika dan Sains. Kedua, Spesialisasi Sosial mencakup Geologi, Sejarah, Ilmu Kemanusiaan dan Kemanusiaan, dan Keuangan. Ketiga, bahasa dan karya seni Indonesia, bahasa dan karya seni Inggris, bahasa dan karya seni Arab, dan bahasa dan karya seni Mandarin semuanya dimasukkan sebagai mata kuliah mata dalam Peminatan Bahasa. Teknologi terapan, Literasi media, dan Pilihan lintas minat dan pendalaman minat adalah dua contoh pilihan.

Pengintegrasian mata pelajaran IPA ke dalam materi diskusi pelajaran matematika dan tematik untuk kelas V dan VI merupakan persoalan kurikulum baru 2013 yang perlu dicarikan solusinya. Mata pelajaran Sosiologi dikoordinir menjadi materi percakapan topikal contoh Pelatihan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Bahasa Indonesia. Penghapusan jurusan SMA dan pemberlakuan kembali Kursus Pendidikan Pancasila berdiri berdampingan dengan Kursus Kewarganegaraan merupakan dua hal tambahan yang perlu mendapat perhatian.

Dimungkinkan untuk membenarkan integrasi mata pelajaran dalam ilmu sosial dan ilmu alam sebagai tidak menghapuskan. Dalam arti mengurangi jumlah jam yang dihabiskan untuk instruksi kognitif, minimalisasi diperlukan untuk menyediakan waktu yang cukup bagi perkembangan pemikir dan pelaku kreatif. Akibatnya, landasan filosofis pendidikan harus tercermin dalam buku pelajaran, silabus, dan dokumen yang berkaitan dengan kurikulum, termasuk kompetensi inti, kompetensi dasar, struktur kurikulum, pedoman, dan standar kompetensi lulusan. Karena sekolah tidak menganut kasta atau kelompok strata, maka isu penghapusan jurusan dari sekolah menengah juga dapat dibenarkan. Karena perbedaan minat akademik, satu siswa akan berbeda dari yang lain. Karena nilai-nilai Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia, maka persoalan mengembalikan mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan juga sah. Pendidikan karakter berfokus terutama pada pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, dan pendidikan pancasila.²⁸

Pembinaan karakter merupakan upaya yang diatur tidak semata-mata untuk menjadi sadar melalui pembelajaran mental, namun memerlukan perhatian dan asimilasi nilai. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dari pendidikan nilai semuanya tercakup. Selain mendidik siswa tentang nilai-nilai yang paling luhur, pendidikan nilai bertujuan untuk menumbuhkan rasa simpati dan empati. Agar peserta didik dapat mengembangkan akhlak mulia, Pendidikan nilai membutuhkan banyak waktu.²⁹

Perlunya pembenahan beberapa pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia

²⁷ Munawaroh, 'The Influence of Teaching Methods and Learning Environment to the Student's Learning Achievement of Craft and Entrepreneurship Subjects at Vocational High School', *International Journal of Environmental & Science Education*, 12.4 (2017), 665–78.

²⁸ Nurul Qomariah, 'Filsafat Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)', *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 19.1 (2019), 72–86 <<https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v19i1.92>>.

²⁹ Rustam, 'Strategi Kepemimpinan Kiai Dalam Membentuk Karakter Aswaja', *Ilmu Al-Qur'an (IQ) Jurnal Pendidikan Islam*, 3.2 (2020), 265–78 <<https://doi.org/10.37542/iq.v3i02.133>>.

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Persekolahan Umum merupakan hal yang penting untuk ditindaklanjuti karena adanya rencana program pendidikan tahun 2013 yang baru. Pasal 37 Bagian X menentukan bahwa topik dan kurikulum pendidikan Pancasila tidak diwajibkan oleh perguruan tinggi untuk rencana pendidikan instruksional esensial dan tambahan. Selain itu, pada Bab II, pasal 3 yang membahas fungsi dan tujuan pendidikan nasional harus diubah agar lebih konsisten dengan nilai-nilai Pancasila.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan hasil penelitian studi pustaka, konsistensi dasar ontologis terhadap sistem Pendidikan Nasional; pandangan bangsa Indonesia tentang makna eksistensi manusia merupakan landasan aksiologisnya. Menjadi satu, makhluk monopluralis (senyawa tunggal) adalah inti dari keberadaan manusia. Komponen tubuh dan jiwa (pikiran, indera, dan kehendak) digabungkan dalam bentuk aslinya; Sifat regulernya adalah gagasan tentang makhluk individu dan makhluk sosial dalam solidaritas soliter, serta situasi normalnya sebagai individu bebas dan hewan Tuhan dalam solidaritas soliter.

Nilai-nilai agama Pancasila yang merupakan landasan dan sumber nilai kemanusiaan menjadi landasan aksiologis Sistem Pendidikan Nasional. Nilai-nilai persatuan bangsa, demokrasi rakyat, dan keadilan, semuanya dilandasi dan bersumber dari nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Dalam merumuskan tujuan pendidikan, khususnya yang berkaitan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam Pancasila, perlu diperhatikan landasan aksiologis sistem pendidikan nasional.

Perlu dilakukan pembenahan rumusan Tujuan dan fungsi pendidikan nasional yang tercantum dalam Bab II Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional adalah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menumbuhkan pemikiran rasional dan akhlak mulia. Tujuan persekolahan umum adalah untuk membina kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang dapat berpikir secara logis dan berakhlak mulia, terutama mempertahankan aspek kebenaran, kebaikan, keagungan, dan agama, serta menjadi warga negara yang kreatif dan produktif. meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan perkembangan mayoritas dan budaya kekinian.

Sudah selayaknya Pendidikan Pancasila kembali ke kurikulum 2013 sebagai satu kesatuan yang tersendiri daripada diintegrasikan dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Landasan aksiologis Sistem Sekolah Negeri Indonesia adalah sisi positif dari Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Kolo, 'pembinaan nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan di wilayah perbatasan indonesia dengan timor leste', *Nasionalismen Dan KeBangsaan*, 8.2 (2019)
- Akbar, Ilham, Mahmud Arif, and Januariansyah Arfaizar, 'Aksiologi Pendidikan Islam', *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 6.1 (2021), 13–22 <<http://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/107>>
- Arikunto, Suharsimi, 'Metode Penelitian Metode Penelitian', *Metode Penelitian Kualitatif*, 5.17 (2017), 43
- Fadhillah, Dilla, 'Manusia Dan Pendidikan Dalam Sudut Pandang Filsafat Pendidikan Islam: Literature Review', *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 18.2 (2022), 46–57

- <<https://doi.org/10.31000/rf.v18i2.6822>>
- Fithriani, 'Implikasi Aksiologi Dalam Filsafat Pendidikan', *Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 4.2 (2019), 83–92
- Fithriani, 'Pandangan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Manusia, Masyarakat dan Lingkungan', *Pandangan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Manusia, Masyarakat Dan Lingkungan*, *Jurnal Intelektualita*, 4.1 (2016), 47–65
<http://narqwelovers.blogspot.co.id/2015/12/pandangan-filsafat-pendidikan-islam_15.html>
- Herlina, L, 'strategi pendidikan nilai islami di perguruan tinggi umum (studi kasus di fakultas kedokteran universitas mataram)', *PALAPA : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 7.3 (2019), 131–48
- Huda, Abdul Karim Koirul, 'menjadikan pancasila dan uud sebagai landasan filosofis pengembangan kurikulum di indonesia', *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4.1 (2021)
- Ifmawati, Ifmawati, 'Nilai-Nilai Filosofis Dalam Pendidikan Agama Islam', *Journal of Islamic Education and Innovation*, 1.2 (2020), 9 <<https://doi.org/10.26555/jiei.v1i2.3384>>
- Kebangsaan, Persoalan, 'Filsafat Ilmu Dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan', *Jurnal Filsafat*, 21.2 (2016), 99–117
<<https://doi.org/10.22146/jf.3111>>
- Mappasiara, 'Filsafat Pendidikan Islam', *Inspiratif Pendidikan*, 6.2 (2017), 269
<<https://doi.org/10.24252/ip.v6i2.5231>>
- Marjuni, 'Filsafat Pendidikan Pancasila Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Aqidah-Ta*, VII.1 (2021), 82
- Muizudin, 'Implementasi Konsep Aliran Filsafat Pendidikan John Dewey Dalam Pendidikan Nilai-Nilai Islam', *JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, 06.2 (2022), 184–99
- Munawaroh, 'The Influence of Teaching Methods and Learning Environment to the Student's Learning Achievement of Craft and Entrepreneurship Subjects at Vocational High School', *International Journal of Environmental & Science Education*, 12.4 (2017), 665–78
- Mustaghfiroh, Hikmatul, 'Rekonstruksi Filsafat Pendidikan Islam (Mengembalikan Tujuan Pendidikan Islam Berbasis Tujuan Penciptaan Dan Tujuan Risalah)', *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10.1 (2015), 89–104
<<https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.786>>
- Nurhalisa, Siti, Anika Musayadah, Naila Ulfatusy Syarifah, Adila Puspitasari, Nasikhin Nasikhin, and Mahfud Junaedi, 'The Urgence Of Islamic Philosophy For Education In Elementary School', *JASNA : Journal For Aswaja Studies*, 2.2 (2022), 31–40
<<https://doi.org/10.34001/jasna.v2i2.3707>>
- Nuthpaturahman, 'perbandingan filsafat pendidikan islam dan filsafat pendidikan barat', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.2 (2022), 1392–1408
- Östlund, Ulrika, Lisa Kidd, Yvonne Wengström, and Neneh Rowa-Dewar, 'Combining Qualitative and Quantitative Research within Mixed Method Research Designs: A Methodological Review', *International Journal of Nursing Studies*, 48.3 (2011), 369–83
<<https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.10.005>>

- Pristiwiyanto, 'pancasila dalam kajian filsafat: ontologi, epistemologi dan aksiologi', *Fatawa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2.1 (2021), 253–62
- Qomariah, Nurul, 'Filsafat Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)', *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 19.1 (2019), 72–86 <<https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v19i1.92>>
- Rizki, Reffy Ananda, and Lulu Fahkrunisa, 'Evaluation of Implementation of Independent Curriculum', *Journal of Curriculum and Pedagogic Studies (JCPS)*, 1.4 (2022), 32–41 <<https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jcps>>
- Rustam, 'Strategi Kepemimpinan Kiai Dalam Membentuk Karakter Aswaja', *Ilmu Al-Qur'an (IQ) Jurnal Pendidikan Islam*, 3.2 (2020), 265–78 <<https://doi.org/10.37542/iq.v3i02.133>>
- Safitri, Ulandari, Adek Nuarizal, and Nurhizrah Gistituati, 'Urgensi Analisis Kebijakan', *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6.1 (2021), 72 <<https://doi.org/10.29210/3003818000>>
- Satiti, Abidah Dwi Rahmi, and Falikhatun Falikhatun, 'Accounting Curriculum Evaluation in Implementation Merdeka Belajar - Kampus Merdeka', *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 11.1 (2022), 21 <<https://doi.org/10.25273/jap.v11i1.9880>>
- Semadi, Yoga Putra, 'Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter', *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2.2 (2019), 82 <<https://doi.org/10.23887/jfi.v2i2.21286>>
- Smith, Hindun, 'Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.4 (2023), 184–90
- Spector, J. Michael, M. David Merrill, Jan Elen, and M. J. Bishop, 'Handbook of Research on Educational Communications and Technology', in *Handbook of Research on Educational Communications and Technology: Fourth Edition*, 2014, pp. 1–1005 <<https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3185-5>>
- Yassa, Sunarni, 'Pendidikan Pancasila Ditinjau Dari Perspektif Filsafat (Aksiologi)', *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.12928/citizenship.v1i1.10442>>
- Zarkasyi, Ahmad, 'Pendidikan Diniyah Kajian Filsafat Pendidikan Islam', *Qolamuna (Jurnal Studi Islam)*, 6.1, 135–52